



**PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Annisa Eston\*, Untung Dwi Hananto, Amiek Soemarmi  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [nisaeston@gmail.com](mailto:nisaeston@gmail.com)

**Abstrak**

Pembangunan Nasional dapat dilihat dengan adanya perkembangan dalam bidang pariwisata, karena pariwisata merupakan sektor andalan yang dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara. Artinya sektor tersebut telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perekonomian bangsa, sekaligus memberikan subsidi yang besar bagi kemajuan suatu daerah. Daerah tersebut yaitu Kabupaten Banyuwangi yang merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, serta kendala bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan sektor pariwisata di Banyuwangi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dibuktikan dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dapat mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.

***Kata Kunci : Pengelolaan pariwisata, Dinas Pariwisata, Kabupaten Banyuwangi***

***Abstract***

National development can be seen with the increase in tourism , because tourism is a primary sector can be used as a source of foreign exchange. This means that the sector has provided a substantial contribution to the nation's economy , while providing large subsidies to the progress of a region. The area is Banyuwangi which is the largest district in East Java, which is in the east end of the island of Java . The objective of this study is to determine the management of Banyuwangi tourism potential with regard to the implementation of the duties, powers , as well as an obstacle for the Department of Culture and Tourism Banyuwangi in improving the tourism sector in Banyuwangi. The study states that the Department of Culture and Tourism Banyuwangi have carried out their duties properly as it has been stipulated in the regulation regents No. 52 of 2011 Concerning Details of tasks, functions and Working Procedure of Department of Culture and Tourism Banyuwangi , evidenced by the increasing tourists visiting Banyuwangi every year. It explains that the Department of Culture and Tourism Banyuwangi can realize an efficient and effective performance in carrying out its duties and functions related to the management of tourism potential in Banyuwangi

***Keywords : Tourism management, Government tourism office, District of Banyuwangi***



## I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional erat kaitannya dengan hukum, karena hukum sebagai alat pembangunan negara. Hukum sebagai landasan filosofis untuk memberi peran yang lebih penting kepada masyarakat dalam rangka mendukung proses pembangunan negara.<sup>1</sup> Perkembangan dikhususkan dalam bidang pariwisata, karena pariwisata merupakan sektor andalan yang dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara. Di Indonesia sektor pariwisata telah menjadi komoditas yang sangat penting karena sektor ini telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perekonomian bangsa, yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan subsidi yang besar bagi kemajuan suatu daerah.<sup>2</sup>

Menurut pasal 18 UUD 1945 Indonesia menganut sistem desentralisasi sehingga dikenal adanya pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan tersebut adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, dalam hal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggung jawab oleh urusan

pariwisata di setiap daerah. Pengelolaan pariwisata berkaitan dengan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan secara khusus dibahas disini yaitu Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah Kabupaten ini membentang dari dataran tinggi hingga dataran rendah yang mempunyai daya potensi kekayaan sumber daya alam. Kabupaten Banyuwangi mempunyai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang sangat beragam.

Berkembangnya pariwisata di Banyuwangi, berkaitan erat dengan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dapat dipastikan karena dengan dibangunnya dan berkembangnya pariwisata di Banyuwangi, semakin banyak wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri yang berkunjung ke Banyuwangi. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke banyuwangi, dapat menambah devisa juga pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi, yang nantinya apabila diupayakan sebaik mungkin, akan menambah pemasukan daerah, juga memberi lapangan kerja bagi warga sekitar.

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku dan lebih

---

<sup>1</sup>Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*,(Bandung:Bina Cipta,1988)halaman 32

<sup>2</sup> HadinotoK, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*,(Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia,1996),halaman 16



menitikberatkan pada penelitian data primer yang diperoleh dari lapangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kenyataan atau fakta-fakta yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisis dan dijabarkan agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan analisis yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>3</sup>

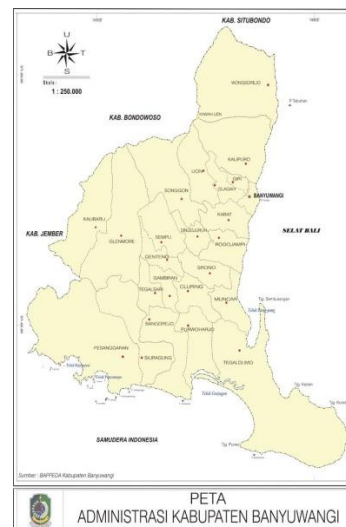
### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum tentang Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km<sup>2</sup>. Banyuwangi merupakan daerah kawasan hutan karena wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak apabila dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Secara geografis

Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa.

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7 43' - 8 46' Lintang Selatan dan 113 53' - 114 38' Bujur Timur. Kabupaten Banyuwangi secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan Samudera Indonesia serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.



Gambar 1 : Peta Kabupaten Banyuwangi

#### B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi di bidang Kebudayaan

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit*, halaman 32



dan Pariwisata yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi juga mewujudkan visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

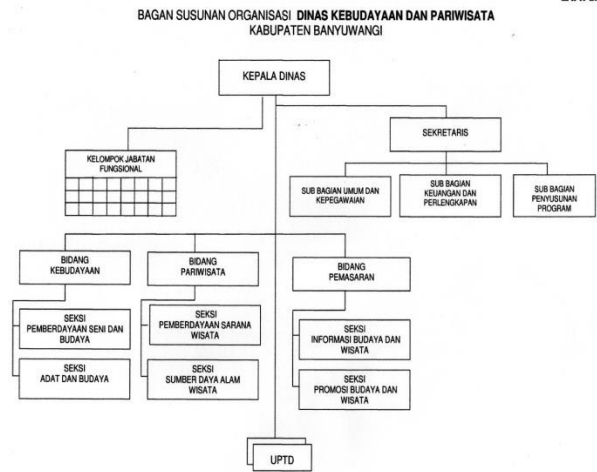
Tugas utama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi agar dapat mewujudkan kinerja yang lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat diantaranya adalah Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, dan Bidang Pemasaran.

LAMPIRAN 15



Perencanaan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari visi dan misi yang dimiliki. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu "Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi Sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional Yang Berbasis Kebudayaan Dan Potensi Alam Serta Lingkungan."

Penjelasan visi : Pariwisata Kabupaten Banyuwangi diperlukan dukungan semua pihak untuk penciptaan kondisi keamanan yang kondusif, bersih, indah, aman, ramah, dan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang mendorong pertumbuhan sektor kebudayaan dan pariwisata serta membangun citra Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat wisata yang berbasis kebudayaan dan potensi alam serta lingkungan sekaligus terposisi sebagai pintu gerbang pariwisata.

Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai satu



organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya, untuk itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi ke dalam 2 (dua) tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya.

Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi antara lain, strategi yang digunakan adalah akselerasi program yaitu dengan menggerakkan potensi dan penunjang kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjadikan Kabupaten Banyuwangi mempunyai daya tarik. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu. Menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi perlu ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi tersebut yang telah dilaksanakan yaitu pembinaan dan pengembangan kesenian dan adat budaya daerah serta peningkatan obyek-obyek pariwisata di daerah Kabupaten Banyuwangi sekaligus sebagai upaya peningkatan ekonomi kerakyatan.

## **B.1 Potensi Objek Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang Menjadi Potensi Unggulan**

### 1. Kawah Ijen

Gunung Ijen , sebuah gunung berapi aktif yang mempunyai ketinggian 2443 meter. Kawah seluas 20 km yang dikelilingi dinding kaldera setinggi 300-500 meter. Daya tarik utama dari tempat ini adalah Api Biru atau Blue Fire yang terletak di bawah kawah dan terlihat semakin bagus saat kondisi sekitarnya gelap atau pada saat dinihari.



Gambar 2 : Kawah Ijen

### 2. Pantai Plengkung

Pantai Plengkung lebih dikenal dengan nama G-Land. Pantai Plengkung dijuluki "The Seven Giant Waves Wonder" oleh peselancar asing karena memiliki 7 gulungan ombak hingga 6 meter tingginya.



Gambar 3: Pantai Plengkung





### 3. Teluk Hijau

Pantai Teluk Hijau atau Green Bay berjarak sekitar 90 km dari pusat kota Banyuwangi. Uniknya pantai Teluk Hijau memiliki 2 pantai dengan pesisir yang berbeda yaitu pasir putih bersih dan pesisir berbatu yang tertata rapi oleh alam hanya dibatasi bukit kecil.



Gambar 4 : Teluk Hijau

### 4. Pulau Tabuhan

Pulau yang tidak berpenghuni ini berada di 20 km dari pusat kota Banyuwangi, dengan luas pantai sekitar 5 hektar di antara pulau Dewata Bali dan Pulau Jawa.



Gambar 5 : Pulau Tabuhan

### 5. Pulau Merah

Pulau Merah memiliki bukit hijau cantik yang terdapat di seberang pantai. Menariknya kita dapat mencapai pulau ini ketika air surut dengan berjalan kaki yang hanya berjarak 100 meter.



Gambar 6 : Pulau Merah

### 6. Pantai Wedi Ireng

Pantai ini masih sangat asri dan alami dengan air laut yang berwarna biru dan cukup jernih. Bibir Pantainya dikelilingi pepohonan hijau yang memberikan suasana teduh. Pasir Pantainya tersusun dari pasir berwarna putih dan hitam yang menjadi satu.



Gambar 7 : Pantai Wedi Ireng

### 7. Pantai Sukamade

Berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), Pantai Sukamade merupakan salah satu dari *Triangle Diomond* Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk mencapai pantai ini memang penuh dengan perjuangan karena kawasan Sukamade dikenal memiliki *Jungle track* yang sangat *ekstrem* dengan pemandangan alam yang masih sangat dan eksotis. Pantai sukamade menjadi tempat favorit bagi para penyu mendarat dan bertelur, tempat ini juga dikenal dengan sebutan Istana penyu bagi seluruh jenis penyu yang ada



karena 4 dari 6 jenis penyu yang ada di seluruh dunia mendarat di tempat ini.



Gambar 8 : Pantai Sukamade

## - **Data Kunjungan Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi**

### **Data Kunjungan Wisatawan Dalam Negeri pada 2010-2015**

Tahun 2010 : 304.682 (7,8%)  
Tahun 2011: 396.016 (10,1%)  
Tahun 2012: 514.821(13,2%)  
Tahun 2013: 669,268(17,2%)  
Tahun 2014: 870.048(22,3%)  
Tahun 2015: 1.131.062 (29,1%)

### **Data Kunjungan Wisatawan Luar Negeri pada 2010-2015**

Tahun 2010: 34.285(8,8%)  
Tahun 2011:42.856(11,1%)  
Tahun 2012:53.570(13,8%)  
Tahun 2013:66.963(17,3%)  
Tahun 2014:83.704(21,6%)  
Tahun 2015:104.630(27,1%)

Turis asing yang datang ke Kabupaten Banyuwangi pada umumnya ialah turis asing yang tujuan wisata utamanya mengunjungi Pulau Dewata, namun mereka menyempatkan waktunya untuk mengunjungi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang tidak kalah indahnyanya.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan , wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri yang datang masing-masing mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Wisatawan dalam negeri, tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 91.388 orang atau 2,3%. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 145.805 orang atau 3,1%. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terdapat peningkatan sebanyak 154.447 orang atau 4%. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 200.780 orang atau 5,1 persen. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat peningkatan sebanyak 261.014 orang atau 6,8%. Dapat disimpulkan peningkatan wisatawan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 261.014 atau sebanyak 6,8%.

Data kunjungan wisatawan luar negeri yang berkunjung ke Banyuwangi, Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 terdapat peningkatan sebanyak 8.571 orang atau 2,3%. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 terdapat peningkatan sebanyak 10.714 orang atau 2,7%. Tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat peningkatan sebanyak 13.393 orang atau 3,5%. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terdapat peningkatan sebanyak 16.741 orang atau 4,3%. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat peningkatan sebanyak 20.926 orang atau 6,1%. Disimpulkan dari data tersebut peningkatan kunjungan wisatawan luar negeri tertinggi terdapat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 20.926 atau 6,1%.

Berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi



dapat dilihat dengan peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi dan hal tersebut tentu saja berkaitan dengan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola potensi pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi telah terlaksana dengan baik menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

## **B.2 Kendala serta upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata di Banyuwangi**

### **1. Belum Tersedianya Database yang akurat tentang Aspek Kebudayaan dan Kepariwisataan**

Kurang akuratnya informasi mengenai kebudayaan dan kepariwisataan yang ada di Banyuwangi dapat merugikan wisatawan yang akan berkunjung ke Banyuwangi sehingga diharapkan informasi mengenai Banyuwangi dapat dilengkapi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat menjamin akuratnya informasi tersebut

### **2. Sumber Daya Manusia yang belum merata dan belum memadai**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam menanggapi sumber daya manusia yang belum memadai yaitu dengan

cara dilaksanakannya pelatihan secara rutin.

### **3. Belum Terkelolanya Sumber Daya Pariwisata untuk Peningkatan Produk Pariwisata lokal dengan baik**

Pariwisata dalam suatu daerah perlu diadakan pembangunan untuk menciptakan kesan nyaman bagi wisatawan. Keamanan di sekitar daerah wisata harus dijaga, karena yang dibutuhkan oleh wisatawan selain kenyamanan dan keindahan daerah wisata juga keamanan di sekitar daerah tersebut.

#### **- Upaya – Upaya untuk Menanggulangi Kendala yang Dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi**

1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai penunjang kemajuan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi
3. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagiandari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kabupaten Banyuwangi
4. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Pusat, termasuk promosi wisata melalui pameran didalam maupun luar negeri
5. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah Kab Banyuwangi





6. Akselerasi pembangunan Kab. Banyuwangi sebagai kawasan agrowisata seni dan budaya
7. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasuk pewarisan kepada generasi muda
8. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya di Kabupaten Banyuwangi

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori, dan pembahasan, serta berdasarkan fakta lapangan yang penulis temukan, maka penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Tugas utama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, agar dapat mewujudkan kinerja yang lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat diantaranya adalah Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, dan Bidang Pemasaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang memiliki

kewenangan untuk mengurus sendiri urusan daerah yang berdasarkan otonomi daerah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi antara lain: Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Teluk Hijau, Pulau Tabuhan, Pulau Merah, Pantai Wedi Ireng, Pantai Sukamade. Menurut data yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi minat para wisatawan pada keindahan alam Banyuwangi terlihat dari terus meningkatnya jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya. Para wisatawan yang datang antara lain wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri.

Adapun saran penulis bahwa :

1. Perlunya penyusunan data dan informasi mengenai potensi-potensi yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi seperti daerah tujuan wisata seni budaya, adat-istiadat daerah serta potensi lainnya yang dapat dikemas dan dikembangkan untuk mempermudah wisatawan untuk mendapatkan informasi mengenai Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan pembinaan dibidang pariwisata, terutama kepada pengelola wisata, warga sekitar daerah tujuan wisata dan diharapkan pengelola wisata serta warga sekitar daerah tujuan wisata dapat turut serta mengembangkan



- dan memajukan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi
3. Perlu adanya perbaikan infrastruktur atau jalan dan penambahan rambu-rambu yang jelas menuju daerah tujuan wisata untuk mempermudah wisatawan yang akan berkunjung ke tempat tujuan wisata.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Amal, Ichlasul, *Pemberdayaan DPR dalam Upaya Demokratis, Pidato pengukuhan Guru Besar*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1995)
- Asshiddiqie, Jimly, *Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004)
- Baiquni, M, dkk, *Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusaran Krisis Gopal*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010)
- Fauza, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Handyaningrat, Soewarno, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991)
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1988)
- Igede Pitana, I Ketut Surya, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009)
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: Grasindo, 2011)
- Kaho, Joseph Riwo, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999)
- K, Hadinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni Bandung, 1976)
- Karyono, Hari, *Kepariwisataaan*, (1997: Grasindo, 1997)
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977)
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2002)
- Musanef, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985)
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1985)
- Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press, 1983)



- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988)
- S.T.Kansil, Christine, *Pemerintah Daerah di Indonsia Hukum Administrasi Daerah*, ( Jakarta: Sinar Garafika, 2004)
- Sarwoko, M, *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 1987)
- Soemitro, Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982)
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sufianto, Dadang, *Pengantar Ilmu pemerintahan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Sunaryo, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Sunindhia, Y.W, *Praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Suriyaningrat, Bayu, *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, ( Jakarta: Aksara Baru, 1980)
- Sutopo, HB, *Metode Penelitian Kualitatif I*, (Surakarta: UNS Press, 2002)
- Suyitno, *Perencanaan Wisata, Tour Planning*, (Jakarta: Kanisiu, 2001)
- Syafiie, Kencana Inu, et al., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Waliyanto, *Sistem Basis Data Analisis dan Pemodelan Data*, (Yogyakarta: J&J Learning, 2000)
- Wasistiono, Sadu, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, (Bandung: Fokus Media, 2009)
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

#### SUMBER LAIN :

<http://www.banyuwangikab.go.id>